



Lesson Learned and Best Practices in the Implementation of Solar PV Project in Rural Areas

Oleh:

Drs. SYAMSUDDIN,MM

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Deputi Bidang Produksi

Jakarta, 15 Nopember 2007

KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PRODUKSI

1. ALOKASI DANA TERBATAS



A. FOKUS PADA KEGIATAN UNGGULAN

B. MEMILIKI DAMPAK :

- PERLUASAN KESEMPATAN KERJA -> MENGATASI PENGANGGURAN
- MENINGKATKAN PENDAPATAN MASY. -> MENGATASI KEMISKINAN

2. BANTUAN PERKUATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI TELAH MELALUI PROSES SELEKSI DAN PENILAIAN KELAYAKAN SERTA MENDAPAT REKOMENDASI/DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**MAKNA DUKUNGAN/
REKOMENDASI**

BERTANGGUNGJAWAB PENUH, SETIDAK-TIDAKNYA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AGAR PROGRAM BERJALAN DENGAN BAIK, BERHASIL DAN TIDAK ADA PERMASALAHAN

KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PRODUKSI

3. BANTUAN PERKUATAN KEPADA KOPERASI BERSIFAT STIMULAN. PENGEMBANGAN SELANJUTNYA DILAKUKAN OLEH KOPERASI DAN DAERAH

4. BANTUAN PERKUATAN DIBERIKAN DALAM BENTUK DANA YANG DITRANSFER LANGSUNG OLEH KPPN-1 KE REKENING KOPERASI MASING-MASING

5. PENGGUNAAN DANA BANTUAN PERKUATAN OLEH MASING-MASING KOPERASI BERPEDOMAN KEPADA :

- A. PERMENEGKOP DAN UKM No. 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 YANG TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN No. 19/PER/M.KUKM/III/2007**
- B. SK MENTERI ATAU DEPUTI BIDANG PRODUKSI TENTANG PENETAPAN KOPERASI PENERIMA DAN PENGELOLA BANKUAT**

PENGERTIAN DANA PERGULIRAN :

DANA PERGULIRAN ADALAH DANA YANG DIPEROLEH DARI PENYISIHAN PENDAPATAN BERSIH HASIL USAHA KOPERASI DAN/ATAU ANGGOTANYA YANG BERSUMBER DARI BANTUAN PERKUATAN DAN DITAMPUNG DALAM REKENING PERGULIRAN.

PENGERTIAN REKENING PENAMPUNGAN :

REKENING PENAMPUNGAN ADALAH REKENING GIRO PADA BANK ATAS NAMA KOPERASI YANG DIBUKA UNTUK MENAMPUNG DANA BANTUAN PERKUATAN DARI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM YANG PENCAIRANNYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN DAN TATA CARA YANG DIATUR DALAM PERATURAN INI.

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PERKUATAN

1. KETENTUAN PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN :

A. TAHAP SELEKSI
B. TAHAP PENETAPAN
C. TAHAP PENCAIRAN

D. TAHAP PEMBANGUNAN
E. TAHAP PENGAWASAN
F. TAHAP PENGOPERASIAN

PERAN DINASKOP
KAB/KOTA SANGAT
STRATEGIS

KOPERASI YANG LAYAK DAN
MEMENUHI SYARAT DAPAT
DIUSULKAN

TUJUAN

MENGEMBANGKAN USAHA KOPERASI DAN/ATAU ANGGOTANYA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN.

SASARAN

MENINGKATNYA :

- 1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT;**
- 2. KESEMPATAN LAPANGAN KERJA;**
- 3. KEWIRAUSAHAAN DIKALANGAN KOPERASI DAN/ATAU ANGGOTANYA;**
- 4. JUMLAH DAN PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI;**
- 5. KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK KOPERASI;**
- 6. PELAYANAN KOPERASI KPD ANGGOTA DAN MASYARAKAT.**

PERSYARATAN KOPERASI PENERIMA BANTUAN PERKUATAN (BANKUAT)

UMUM

- KOP. PRIMER
- KANTOR, SARANA, ALAMAT
- PENGURUS AKTIF & LENGKAP
- R A T
- NPWP
- S D M YANG MEMADAI
- RENCANA PENGEMBANGAN
- POTENSI SUMBERDAYA
- MENTAATI KETENTUAN

TAMBAHAN:

- SARANA USAHA (BANGUNAN/GUDANG)
- DETAIL DISAIN/RAB
- TERSEDINYA TENAGA PENGELOLA (OPERATOR/MEKANIK)

MENTERI DAPAT MENETAPKAN LAIN DALAM HAL KOPERASI:

- DI DAERAH MISKIN/TERPENCIL, PERBATASAN, KONFLIK,
- DI DAERAH BENCANA ALAM, PEMEKARAN
- RINTISAN/PERCONTOHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. TAHAP SELEKSI

- A. KOPERASI MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN PROPOSAL KEPADA DINAS KOPERASI KAB/KOTA;
- B. DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA MENSELEKSI DAN MENILAI PROPOSAL
- C. BUPATI/WALIKOTA DAN/ATAU DINAS KOPERASI KAB/KOTA MEMBERIKAN REKOMENDASI SERTA DIAJUKAN KEPADA MENTERI DENGAN TEMBUSAN DINAS KOPERASI PROVINSI;
- D. DINAS KOPERASI PROVINSI MEMBERIKAN DUKUNGAN DENGAN SURAT PENGANTAR ATAS USULAN DARI DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA.

2. TAHAP EVALUASI

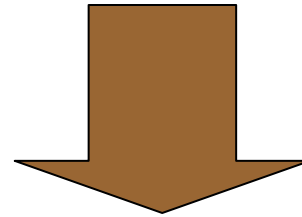
PERMOHONAN KOPERASI YANG DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA DAN/ATAU DINAS KOPERASI KAB/KOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN, DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN NEGARA KUKM

TATACARA PENGUSULAN KOPERASI





PENETAPAN KOPERASI



**DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
ATAU
DEPUTI BIDANG PRODUKSI**

MEMUAT :

- **NAMA DAN ALAMAT KOPERASI,**
- **NOMOR DAN TGL BH KOPERASI,**
- **TAHUN ANGGARAN DAN JUMLAH
DANA - LINGKUP KEGIATAN**

**PERKEMBANGAN PLTS
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM**

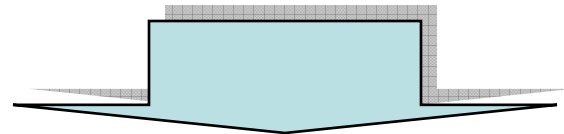
NO.	LOKASI	DAYA TERPASANG	KONSUMEN/ JLH (UNIT)	PROGRAM TAHUN	SUMBER DANA
1.	ACEH	12,5 Kwp	250	1997	Banpres
2.	SUMUT	12,5 Kwp	250	1997	Banpres
3.	RIAU	20,5 Kwp	410	1997	Banpres
4.	SUMSEL	12,5 Kwp	250	1997	Banpres Banpres
5.	LAMPUNG	12,5 Kwp	250	1997	Banpres/Dkop
6.	JABAR	102,5 Kwp	2049	1997	Banpres/Dkop
7.	JATENG	30 Kwp	600	1997	Banpres/Dkop
8.	JATIM	72,8 Kwp	1455	1997	Banpres/USAID
9.	KALTENG	60 Kwp	1200	1997	Banpres
10.	KALSEL	10 Kwp	200	1997	Banpres/BUMN
11.	SULSEL	60 Kwp	1200	1997	Banpres/USAID
12.	SULTRA	62,5 Kwp	1250	1997	Banpres/USAID
13.	SULTENG	37,5 Kwp	750	1997	USAID
14.	SULUT	25 Kwp	500	1997	Banpres/USAID
15.	NTB	37,5 Kwp	750	1997	USAID
16.	NTT	37,5 Kwp	750	1997	USAID
17.	MALUKU	37,5 Kwp	750	1997	Banpres/USAID
18.	TIMTIM	28,3 Kwp	565	1997	USAID
19.	IRIAN JAYA	25 Kwp	500	1997	USAID
20.	NTB	7,3 Kwp	146	2001	Pemer.Jepang
21.	SULSEL	2,5 Kwp	50	2004	APBN

- Catatan: Program Bantuan Dana Perguliran di mulai tahun 2004

DASAR KEBIJAKAN

- Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 775/KPTS/M/Pertamb/1979 dan Nomor : 613/Kpb/X/1979 tentang Pembinaan KUD dibidang Ketenagalistrikan dan Penyaluran Minyak Tanah
- 2. Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
- 3. Permen ESDM No. 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Menengah

KENDALA PENGEMBANGAN PLTS



- Kurangnya kebersamaan persepsi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam menerapkan kebijakan Program PLTS sehingga terjadi kesenjangan sosial di masyarakat penerima bantuan;
- Belum adanya kesamaan tarif listrik;
- Skema khusus untuk kredit pengadaan PLTS belum ada ;
- Kurangnya SDM yang terampil di daerah yang dapat mendukung pengoperasian, perawatan dan perbaikan sistem PLTS;

STRATEGI PENGEMBANGAN PLTS SECARA TERPADU DALAM PENCAPAIAN TARGET

- Pengembangan PLTS dilakukan secara terpadu, yang ditekankan kepada keperluan konsumtif dan produktif
- Pengembangan PLTS tidak hanya dikembangkan diperdesaan tetapi juga dapat dikembangkan di daerah perkotaan
- Segmentasi target pasar dengan pemetaan yang jelas dan pola Program yang disepakati oleh seluruh stakeholder antara lain :
 - konsumen masyarakat kalangan bawah 50 wp
 - konsumen masyarakat yang mampu 150 wp
- Mendorong tumbuhnya industri modul surya dalam negeri
- Menetapkan standar mutu dan spesifikasi sistem PLTS

TERIMAKASIH